

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pemberdayaan Masyarakat

1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan merupakan pembangunan masyarakat (*community development*) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community-based development*). Terkait dengan pemahaman ini diperlukan arti dan makna keberdayaan dan pemberdayaan masyarakat. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diperlukan keberdayaan secara mandiri, bahkan merupakan keharusan untuk lebih dilakukan keberdayaan melalui usaha mereka sendiri dan dari akumulasi pengetahuan, ketertampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal.

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari suatu perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata '*power*' (kekuasaan atau keberdayaan). Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat,

melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Adi berpendapat bahwa proses pemberdayaan yang berkesinambungan sebagai siklus yang terdiri dari lima tahapan antara lain:

1. Menghadirkan kembali pengalaman memberdayakan dan tidak memberdayakan (*recall depowering/empowering experiences*).
2. Mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan penindak berdayaan (*discus reason for depowerment/empowerment*).
3. Mengidentifikasi suatu masalah ataupun proyek (*identify one problem or project*).
4. Mengidentifikasikan basis daya yang bermakna untuk melakukan perubahan (*identy useful power bases*).

5. Mengembangkan rencana-rencana aksi dan mengimplementasikannya (*develop and implement action plans*).¹

Program pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan menggunakan pendekatan *bottom up*, dimana pada pelaksanaannya dilapangan, dilakukan atas inisiatif dan aspirasi dari masyarakat mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan pelaksanaan pembangunan. Masyarakat memiliki peran sangat penting dan dituntut untuk terlibat langsung secara aktif dalam melaksanakan program pembangunan ini, berhasil atau tidaknya program ini ditentukan dari partisipasi masyarakat itu sendiri.²

- a. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.
- b. Pemberdayaan merupakan sebuah dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam kejadian-kejadian lembaga yang mempengaruhi hidupnya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang mendapatkan keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempegaruhi kehidupannya dan kehidup orang lain yang menjadi perhatian.

¹ Arif dan Riyadh, *Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa*, jurnal: JKMP Vol. 2, No.1, hal 56-57

² Suhartini A. Halim, *Model Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta:Pustaka pesantren,2005), hal 8

- c. Pemberdayaan menunjukkan pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui mengubah struktur sosial.
- d. Pemberdayaan adalah suatu mana rakyat, organisasi dan komunitas yang diarahkan agar mampu menguasai kehidupannya.

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong motivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berusaha mengemangkan potensi yang tidak nyata.³

Istilah dalam pemberdayaan semakin sangat populer dalam konteks pembangunan dan pengetasan kemiskinan. Konsep ini berkembang secara realita individu tau masyarakat yang tidak berdaya dan masyarakat yang lemah. Ketidak berdayaan atau memiliki kelemahan ini memiliki beberapa aspek antara lain: pengetahuan, pengalaman, sikap, keterampilan, modal usaha, kerja keras, ketekunan, dan aspek lainnya. Konsep pemberdayaan masyarakat jika ditelaah sebenarnya manusia itu sebagai subjek dari dunianya sendiri. Pola dasar dalam gerakan pemberdayaan menekankan kepada keterampilan keelompok yang berdaya.⁴

Pemberdayaan menurut kartasmita merupakan upaya untuk mendorong dalam kemampuan membangun individu untuk memotifasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang

³ Zubaedy, *Pengemabngan Masyarakat Wacana dan Pratek*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), hal 24

⁴ *Ibid*, hal 72

dimiliki serta mengembangkannya. Dari pengertian itu dapat disamakan dengan istilah pengembangan atau dapat pula disamakan dengan istilah pembangunan.⁵

Sulistiyani berpendapat bahwa pemberdayaan secara etemonologi berasal dari kata daya yang berarti kekuatan atau kemampuan. Dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan dan pemberian daya dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Hakikat dalam pemberdayaan merupakan membuat masyarakat mampu membangun diri dan memperbaiki kehidupannya sendiri. Istilah mampu dalam ini ialah mengandung makna berdaya, pemahaman, termotivasi, memiliki peluang kesempatan dan melihat manfaat dari peluang itu sendiri dan mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko dan mampu mencari informasi sesuai dengan kemampuan. Sedangkan indikator dalam pemberdayaan memiliki beberapa hal antara lain: kegiatan terencana atau kolektif, memperbaiki kehidupan bermasyarakat,

⁵ Agus Ahmad Syafe'I, *pengembangan masyarakat islam dari ideologi sampai tradisi*, (Bandung: Remai & Rosdakarya, 2001) hal 42

prioritas dalam kelompok lemah atau beruntung melalui program peningkatan kapasitas.⁶

Dalam pelaksanaan pemberdayaan memiliki makna atau dorongan motivasi, bimbingan atau sebuah pendampingan dalam peningkatan kemampuan individu dalam bermasyarakat mampu untuk mandiri. Upaya tersebut merupakan sebuah tahapan dalam proses pemberdayaan perilaku, mengubah kebiasaan lama menuju kebiasaan baru dalam kesejahteraan masyarakat.⁷ Pemberdayaan menurut karls adalah proses dalam pembentukan kapasitas yang lebih besar seperti kekuasaan, pengawasan dan pengambilan keputusan serta tindakan transformasi. Dalam pemberdayaan tenaga kerja perempuan terdapat beberapa prinsip yakni:

- a. Capacity Bulding adalah membangun kemampuan perempuan.
- b. Cultural Change adalah perubahan-perubahan budaya yang memihak perempuan.
- c. Structural Adjustment adalah penyesuaian terhadap structural yang berpihakpada perempuan.

⁶ Supriyanto, *Implementasi Simpan Pinjam Perempuan Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Ds Balai Rejo Kec Kalirejo Kab Lampung Tengah*, skripsi (Lampung, UIN RADEN INTAN 2019)

⁷ *Ibid*, hal 44

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan atau pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Dalam penelitian ini yang dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan udanawu kabupaten blitar.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Ekonomi

Pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi khususnya diwilayah pedesaan, perempuan memiliki keterbatasan dalam menjalani aktivitasnya, keterbatasan tersebut seperti rendahnya pendidikan, sedikitnya keterampilan, peluang pekerjaan yang minim dan hambatan ideologis perempuan terkait rumah tangga. Selain itu, perempuan dihadapkan pada kendala tertentu, yaitu perempuan harus melakukan fungsi reproduksi, produksi dan fungsi sosial bersamaan dengan masyarakat. Hal tersebut menyebabkan kesempatan perempuan untuk memanfaatkan peluang ekonomi sangat minim. Oleh karena itu, program pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi sangat diperlukan karena pada dasarnya perempuan memiliki potensi yang luar biasa dalam perekonomian terutama dalam mengatur rumah tangga.

Konsep pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi sebagai model pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak

pada mayoritas rakyat. Konsep ini dibangun dari kerangka logika sebagai berikut:

- a. Bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan penguasa faktor produksi
- b. Faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat pengusaha pinggiran
- c. Kekuasaan akan membangun atas sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan ideologi manipulative untuk memperkuat dan legitimasi.
- d. Sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan ideologi secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat: masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya. Akhirnya sering terjadi adalah masyarakat yang kuasa dan manusia yang dikuasai melalui proses pemberdayaan.⁸

Pemberdayaan ekonomi merupakan salah satu bentuk dari program pemberdayaan yang berfokus pada usaha memberdayakan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, dalam usaha memberdayakan ekonomi masyarakat diperlukan adanya sebuah pendekatan. Adapun pendekatan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat antara lain:

- a. Harus terarah dan ditujukan langsung kepada yang memerlukan.
- b. Harus mengikuti keseluruhan kesertaan lapisan masyarakat.

⁸ Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi*, (Yogyakarta: Adia Press, 2000), hal 1-2

- c. Melalui pendekatan kelompok adalah salah satu pendekatan yang paling efektif sehingga pengguna sumber daya juga lebih efisien.⁹

Dalam proses pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendekatan melalui kelompok merupakan pendekatan yang efektif dalam suatu usaha memberdayakan masyarakat. Dengan menggunakan proses pendekatan kelompok seperti diatas maka keuntungan yang diperoleh antara lain:

- a) Masyarakat ekonomi golongan lemah yang memiliki kekurangan akan lebih beruntung karena jika diadakan bersama-sama lebih mudah.
- b) Adanya pertimbangan aspek biaya dan tenaga yang sama besarnya dengan jumlah pendekatan kelompok akan bisa melayani kelompok tetap sasaran yang lebih banyak dan secara menyeluruh.
- c) Adanya terkaitan dengan budaya kita antara lain bahwa hidup berkelompok, sikap gotong-royong, saling membantu sudah menjadi kebudayaan tradisi masyarakat Indonesia dan apabila diberikan arahan yang bersifat membangun lebih mudah dikembangkan.

⁹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: kajian strategi pembangunan kesejahteraan social & pekerjaan sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 20107), hal 67

- d) Lewat pendekatan kelompok bila ada lembaga keuangan yang akan melayani pinjaman modal maka nilai dari resiko kemacetan akan dapat ditekankan.
- e) Lewat kelompok adanya pendekatan-pendekatan solidaritas atau kekeluargaan.
- f) Lewat Pendidikan kelompok terjadinya proses belajar mengajar di antara kelompok. Hal ini dapat terjadi berbagai kesempatan seperti pertemuan rutin.

Oleh karena itu keberadaan kelompok akan memegang peran penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat ekonomi. Sebab, pendekatan ini melalui kelompok berdasarkan unsur kebersamaan dan tanggung jawab yang moral merupakan landasan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam usaha yang mandiri melalui kelompok, kesulitan yang dihadapi akan mudah dipecahkan bersama-sama seperti modal, kurangnya pengetahuan dan strategi pemasaran produk mereka.

3. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Program pemberdayaan masyarakat memerlukan pendekatan yang tepat dan sesuai dengan kelompok masyarakat yang dituju. Beberapa pendekatan untuk meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan telah digunakan. Pendekatan pertama kali adalah pendekatan kesejahteraan, bagaimana kesejahteraan itu ditingkatkan, wanita dianggap sebagai objek pembangunan. Pendekatan kesesamaan , kemudian pendekatan anti-miskin, efisiensi dan sebagainya, yang

semuanya dianggap tidak mampu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh kaum perempuan itu sendiri. Sampai akhirnya munculah pendekatan mutakhir yang disebut dengan pendekatan pemberdayaan.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat lahir tidak kepuasaan terhadap pendekatan-pendekatan sebelumnya. Pendekatan ini diasumsikan kepada memperbaiki posisi masyarakat dibutuhkan upaya untuk meningkatkan kekuasaan tawar-menawar dalam mengubah nasib. Pendekatan perempuan ini menghapuskan pusat perhatian. Ini berarti bahwa kesamaan ekonomi resmi yang diskriminatif serta hak-hak reproduksi dimasukkan dalam agenda. Pendekatan ini lebih bersifat ideologis dan filosofis. Untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari tentu saja pendekatan ini membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi local perempuan dan masyarakat yang bersangkutan.

Pendekatan pemberdayaan memahami tujuan pembangunan bagi perempuan dalam hal kemandirian dan kekuatan internal dan sedikit banyak lebih menekankan pada pembuatan undang-undang yang berkenaan dengan kesamaan antara laki-laki dan perempuan disbanding pemberdayaan perempuan sendiri.¹⁰

¹⁰ Isnaeni, *Pemberdayaan Perempuan Dalam Kegiatan Simpan Pinjam di Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas*, skripsi (PURWOKERTO, IAIN PURWOKERTO 2018)

4. Indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat menjadi cita-cita semua orang. Namun untuk mengetahui keberhasilan sebagai sebuah proses dapat dilihat dari indikator pencapaian keberhasilan. Indikator keberhasilan program pelaksanaan pemberdayaan mencakup antaranya:

- a. Berkurangnya jumlah penduduk miskin.
- b. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan penduduk miskin melalui pemanfaatan sumber daya yang ada.
- c. Meningkatkan kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usahaproduktif anggota dan kelompok.
- d. Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapat.¹¹

5. Pemberdayaan Masyarakat Menurut Pandangan Islam

Islam memandang masyarakat sebagai sistem individunya saling membutuhkan dan saling mendukung. Antar individu masyarakat mempunyai hubungan yang ideal saling menguntungkan. Kesenjangan dalam hal pendapatan ekonomi merupakan sebuah potensi yang dapat dimanfaatkan guna memupuk kerukunan dan silahturahim antar sesama.

- a. Islam mendorong pelaksanaan pemberdayaan masyarakat berpegang teguh kepada 3 aspek antara lain:

¹¹ Marliyah, *model pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan ketahanan pangan masyarakat agribisnis di Kawasan bandung*, majalah ilmiah edisi khusus dies natalis vol. xx, no 3 tahun 2013, hal 26

- a) Prinsip *Ukhuwwah*. *Ukhuwwah* dalam Bahasa arab berarti persaudaraan. Perinsip ini menegaskan bahwa tiap-tiap muslim saling bersaudara walaupun tidak ada pertalian darah antara mereka. Rasa persaudaraan menjamin adanya rasa empati dan merekat silaturahmi dalam masyarakat. Rasulullah mengumpamakan umat Islam sebagai sebuah bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Dalam konteks pemberdayaan, *ukhuwwah* merupakan motif yang mendasari seluruh upaya pemberdayaan masyarakat. Rasulullah memiliki visi masyarakat muslim yang saling menolong dan saling menanggung kesulitan secara bersama. Islam mendorong pemeluknya untuk meringankan beban saudaranya yang dilanda kesulitan lalu rasulullah bersabda “*barang siapa yang melapangkan kesusahan di dunia dari seorang mukmin, maka allah akan melapangkan dari satu kesusahan di hari kiamat*”. Islam merupakan agama yang menanamkan kepedulian dalam diri pemeluknya.
- b) Perinsip *Ta’awun*, perinsip *ta’awun* atau tolong menolong merupakan prinsip utama dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Karena sesungguhnya program pemberdayaan itu adalah sebuah upaya menolong individu dan masyarakat yang membutuhkan bantuan dan bimbingan. Upaya pemberdayaan harus dimulai dari rasa kepedulian dan niat

menolong individu dan masyarakat yang membutuhkan. Hal ini berasal dari rasa persaudaraan yang tumbuh dari ikatan *ukhuwwah*. Allah SWT mendorong manusia untuk saling tolong-menolong sesamanya. Allah SWT berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-nya.”¹²

Perinsip *ta'awun* atau tolong menolong ini juga dapat diartikan sebagai sebuah sinergi berbagai pihak yang berkepentingan demi terwujudnya pemberdayaan yang optimal. Pemberdayaan masyarakat adalah proses kalaboratif, maka hendaknya seluruh pihak saling membantu demi terwujudnya tujuan bersama. Pemberdayaan bukan tanggungjawab pihak tertentu saja, melainkan tanggungjawab seluruh pihak terkait. Pemerintah tidak akan mampu menyelesaikan masalah sendiri tanpa sinergi dengan pihak lain. Dengan *ta'awun* pemerintah, lembaga zakat, organisasi ulama, organisasi islam, dan berbagai LSM dapat bahu-membahu memadukan kekuatan finansial, manajemen, sumber daya manusia, metodologi, dan penentuan

¹² Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 2, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama Republik RI, (Jakarta : fokus media,2010), hal 106

kebijakan sehingga terciptanya sinergi yang efektif dalam melaksanakan pemberdayaan dan mengetaskan kemiskinan.

- c) **Persamaan Derajat.** Perinsip persamaan derajat antar umat manusia. Islam telah memproklamirkan persamaan derajat antar umat manusia sejak abad 14 yang lalu.¹³

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: *“wahai manusia sesungguhnya, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling bertakwa. Sunggh, Allah Maha Mengetahui Maha telitu.”*¹⁴

Ayat diatas menegaskan bahwa persamaan derajat anatar umat manusia, dan bahwa kemuliaan yang ada di sisi Allah hanyalah berdasarkan iman dan takwa. Ayat diatas juga menekankan bahwa pada dasarnya perbedaan harta dan

¹³ Sany, *prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat dalam perspektif al qur'an*, jurnal ilmu dakwah volume 39 no 1 (2019), hal 34-35

¹⁴ Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 13, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama Republik RI, (Jakarta : fokus media,2010), hal 517.

kekayaan tidak menjadi sumber perpecahan, akan tetapi menjadi wasilah dan tolong-menolong dan saling membantu.¹⁵

b. Misi pemberdayaan menurut islam

Pemberdayaan dalam islam mengandung tiga misi diantaranya:

- a) misi pembangunan ekonomi dan bisnis yang berpedoman pada ukuran-ukuran ekonomi dan bisnis.
- b) Pelaksanaan etika dan ketentuan hukum Syariah yang harus menjadi ciri kegiatan umat islam.
- c) Membangun kekuatan ekonomi umat islam sehingga menjadi sumber dana pendukung dakwah islam.¹⁶

c. Prinsip pengelolaan program pemberdayaan menurut islam

Menurut pandangan agama islam, setiap pengelolaan program pemberdayaan agar tercapai tujuan yang diharapkan maka setiap pengelolaan harus berdasar pada prinsip moral dan nilai-nilai keislaman. Nilai-nilai tersebut antara lain:

1) Amanah

Amanah memiliki arti dapat dipercaya. Dalam harta, orang yang amanah pandai menjaga titipan. Dalam kehidupan sehari-hari, orang yang amanah dapat menjaga aib saudaranya. Sikap amanah harus dimiliki setiap orang, apalagi bagi orang yang memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan pelayanan

¹⁵ *Ibid*, hal 36

¹⁶ Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial, Ekonomi*, (Yogyakarta:Lembaga Studi Agama dan Filsafat) hal. 389

masyarakat. Bagi seorang pengurus organisasi, sifat amanah sangatlah penting, jika seorang pengelola organisasi tidak memiliki sifat amanah, maka kepercayaan masyarakat sangat sulit didapat.¹⁷

2) Kejujuran

Kejujuran adalah setiap manusia harus memiliki kejujuran dan harus selalu melandasi ucapan, keyakinan, dan perbuatan berdasarkan ajaran islam. Tidak ada pertentangan yang disengaja antara ucapan dan perbuatan. Seseorang harus mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah walaupun sangat berisiko.

Dalam pengelolaan pemberdayaan kejujuran bisa berarti kejujuran tentang beberapa jumlah dana yang diperoleh dari pemerintah, dan berapa pengeluarannya. Kejujuran atas tuntutan hidup bersama dengan kejujuran atas kualitas barang yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat dan sebagainya. Kerjasama dalam berusaha akan membuahkan hasil yang baik jika ada kejujuran semua pihak. Tanpa kejujuran semua pihak, kerjasama usaha tidak akan bertahan lama.

3) Shiddiq

Artinya shiddiq adalah benar. Ini sifat utama yang juga harus dimiliki oleh pengelola program pemberdayaan.

¹⁷ Erie Sudewo, *Manajemen ZIS*, (Ciputat : IMZ, 2012), hal 95

Kebenaran merupakan landasan tindakan maupun resikonya. Setiap tindakan punya resiko, artinya ambillah resiko yang terkecil madhratnya. Ingat, setiap tindakan dan perbuatan tidak bisa memuaskan semua pihak. Karena tugas kita bukan sebagai pemuas, maka bertindaklah dengan benar.

4) Adil

Sifat adil harus dimiliki oleh pengelola suatu lembaga, sifat adil memiliki suatu pemahaman yang luas. Adil bukan hanya membantu secara imbang antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Adil ternyata harus bisa memberi kesempatan akses info bantuan untuk semua masyarakat. Adil juga memberikan hak kepada yang berhak menerimanya. Adil harus dari kepentingan pribadi. Adil tidak boleh terpengaruh oleh apapun dan adil harus berlandaskan kebenaran dan koridor Syariah. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 90 yaitu:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “*sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi pada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan*

permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”¹⁸

Penerapan sifat adil dalam pengelolaan pemberdayaan misalnya, tidak melakukan nepotisme. Ketika mendapat bantuan maka bantuan tersebut harus diberikan kepada sesuai dengan haknya. Pemberian bantuan harus sesuai dengan datanya.

5) Kebersamaan atau kerjasama

Kita suatu pekerjaan dilaksanakan Bersama-sama, maka terasa akan ringan, kebersamaan atau kerjasama sangat diperlukan agar dalam melakukan kegiatan tidak merasa bosan dan malas. Sistem ini merupakan sistem yang khas sesuai dengan agama islam.

Kebersamaan dalam pengelolaan program pemberdayaan masyarakat melibatkan semua pihak, mulai dari pemerintah sampai masyarakat yang terlibat didalamnya. Keberhasilan dari program pemberdayaan menuntut adanya kerjasama antar pemerintah dan masyarakat.

¹⁸ Al-Qur'an Surat Al-Nahl ayat 90, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama Republik RI, (Jakarta : fokus media,2010), hal 278.

B. Kesejahteraan Perekonomian

1. Pengertian kesejahteraan

Definisi kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lain. Kalau menurut HAM, maka definisi kesejahteraan kurang lebih berbunyi bahwa setiap laki-laki maupun perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan dan jasa sosial, jika tidak maka disebut telah melanggar HAM.¹⁹

Menurut Prabawa, kesejahteraan seringkali diartikan secara luas yaitu sebagai kemakmuran, kebahagiaan, dan kualitas hidup manusia baik pada tingkat individu atau kelompok keluarga dan masyarakat. Keadaan sejahtera dapat ditunjukkan oleh kemampuan mengupayakan sumber daya keluarga untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang dianggap penting dalam kehidupan berkeluarga. Dengan demikian kesejahteraan adalah terpenuhi seluruh kebutuhan baik barang maupun jasa dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

¹⁹ Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005) hal 24

Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang mungkin setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat.

Konsep kesejahteraan menurut Nasikun dapat dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu: (1) Rasa aman (*security*), (2) kesejahteraan (*welfare*), (3) kebebasan (*freedom*), dan (4) jati diri (*identity*). Indikator tersebut merupakan hal yang digunakan untuk melihat kesejahteraan yang mana terciptanya rasa aman, kesejahteraan, kebebasan dan jati diri seseorang dalam memenuhi kebutuhannya.

Menurut Kolle kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan:

- 1) Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya.
- 2) Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya.
- 3) Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya.
- 4) Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.

Indikator kesejahteraan diatas menjelaskan bahwa untuk mengukur kesejahteraan dilihat dari segi materi, segi fisik, segi mental dan segi spiritual. Dengan demikian bahwa kesejahteraan bukan hanya dilihat dari keseluruhan kebutuhan tanpa tergantung kebutuhan yang lain.²⁰

2. Pengertian kesejahteraan perekonomian

Kesejahteraan perekonomian merupakan cabang ilmu ekonomi yang menggunakan teknik ekonomi mikro untuk menentukan secara serempak efisiensi alokasi dari ekonomi makro dan akibat distribusi pendapatan yang saling berhubungan.²¹

Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang tidak terlepas dari pasar. Pada dasarnya kegiatan ekonomi lebih mementingkan sebuah keuntungan bagi pelaku ekonomi dari pasar tersebut. Sehingga sangat sulit dalam menemukan ekonomi yang menyejahterakan, apabila dilihat dari segi mekanisme pasar.

Kriteria yang paling banyak digunakan dalam menilai kesejahteraan ekonomi adalah *pareto criteria* yang dikemukakan oleh ekonom kebangsaan italia bernama vilfredo pareto. Kriteria ini menyatakan bahwa suatu perubahan keadaan (*eg. Intervention*) dikatakan baik atau layak jika dengan perubahan tersebut ada (minimal satu) pihak yang diuntungkan dan tidak ada satupun pihak yang dirugikan.

²⁰ Rosin, *Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara*, Jurnal Geografi Vol 9 No. 1 (2017) hal 57-58

²¹ Lincoln Arsyad, *Ekonomi Mikro*, (Jakarta: Gema Prees, 1999), hal 23

Hal yang perlu diperhatikan dalam *pareto criteria* adalah *pareto improvement* dan *pareto efficient*. Kedua hal ini akan mempengaruhi pengambilan keputusan suatu kebijakan ekonomi. Adapun yang dimaksud dengan *pareto improvement* adalah jika keputusan perubahan masih dimungkinkan menghasilkan minimal satu pihak yang *better off* tanpa membuat pihak lain *worse off*. *Pareto efficient* adalah sebuah kondisi dimana tidak dimungkinkan lagi adanya perubahan yang dapat mengakibatkan pihak yang diuntungkan (*bettering off*) tanpa menyebabkan pihak lain dirugikan (*worsening off*).

Dalam teori mikro ada yang dikenal dengan teori *pareto* yang menjelaskan tiga jenis tingkat kesejahteraan, yaitu *pertama* *pareto optimal*, dalam tingkat *pareto optimal* terjadinya peningkatan kesejahteraan seseorang atau kelompok pasti akan mengurangi kesejahteraan orang atau kelompok lain. *Kedua* *pareto non-optimal*, dalam kondisi *pareto non-optimal* terjadi kesejahteraan seseorang tidak akan mengurangi kesejahteraan orang lain. *Ketiga* *pareto superior* dalam kondisi *pareto superior* terjadinya peningkatan kesejahteraan seseorang tidak akan mengurangi kesejahteraan tertinggi dari orang lain. Menurut teori *pareto* tersebut, ketika kondisi kesejahteraan masyarakat sudah mencapai pada kondisi *pareto optimal* maka tidak ada lagi kebijakan pemerintah yang dapat dilakukan.²²

²² Niswatun Hasanah, *Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Melalui Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Melirangkecamatan Bungah Kabupaten Gresik*, Jurnal Qiema Vol.5 No. 1 2019, hal, 21

3. Jenis-jenis kesejahteraan ekonomi

Terdapat dua jenis kesejahteraan ekonomi yaitu kesejahteraan ekonomi konvensional dan kesejahteraan ekonomi dalam islam.

1) Kesejahteraan ekonomi konvensional

Kesejahteraan ekonomi konvensional hanya menekankan pada kesejahteraan material, dengan mengabaikan kesejahteraan spiritual dan moral. Dimana kesejahteraan konvensional menggunakan pendekatan dalam menentukan kesejahteraan ekonomi, yaitu pendekatan Neo-Klasik dan pendekatan ekonomi kesejahteraan yang baru (*modern*). Pendekatan Neo-Klasik berasumsi bahwa nilai guna merupakan cardinal dan konsumsi tambahan itu menyediakan peningkatan yang semakin kecil dalam nilai guna (*diminishing marginal utility*)²³

Pendekatan Neo-Klasik lebih lanjut beransumsi bahwa semua individu dengan nilai guna milik orang lain. Oleh karena asumsi ini, hal tersebut memungkinkan untuk membangun suatu fungsi kesejahteraan sosial dengan hanya menjumlahkan seluruh fungsi nilai guna individu. Pendekatan modern perkembangan dari Neo-Klasik dimana perpaduan antara kesejahteraan tidak dapat diukur hanya dengan materi namun non materi juga dipertimbangkan dalam menentukan sebuah kesejahteraan. Sebab kesejahteraan meliputi

²³ Dominick Salvatone, *Teori Mikro Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hal 56

jasamani yang bersifat material dan rohani yang bersifat non material.

2) Kesejahteraan ekonomi syariah

Kesejahteraan Ekonomi syariah merupakan tujuan untuk mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan material, kesejahteraan spiritual dan moral. Konsep ekonomi kesejahteraan Syariah bukan saja berdasarkan manifestasi nilai ekonomi, tetapi juga nilai moral dan spiritual, nilai sosial dan nilai politik islam. Dalam pandangan Syariah terdapat 3 segi sudut pandangan dalam memahami kesejahteraan antara lain:

Pertama, dilihat dari pengertiannya, sejahtera sebagaimana telah dikemukakan dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah aman, Sentosa, damai, amkmur, dan selamat dari segala macam gangguan, dan sebagainya. Pengertian ini sejalan dengan pengertian dalam islam yang berarti selamat, Sentosa, aman, dan damai. Dari pengertiannya dapat dipahami bahwa masalah kesejahteraan sosial sejalan dengan misi islam itu sendiri. Misi inilah yang sekaligus menjadi misi kerasulan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana di firman Allah SWT dalam Surat Al-Anbiya ayat 107, yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.”²⁴

Kedua dilihat dari segi kandungannya, bahwa ajaran islam ternyata selalu terkait dengan masalah kesejahteraan sosial. Misalnya hubungan dengan allah harus dibarengi dengan hubungan sesama manusia. Demikian pula anjuran beriman selalu diiringi dengan anjuran melakukan amal saleh, yang didalamnya termasuk mewujudkan kesejahteraan sosial.

Ketiga, mewujudkan kesejahteraan sosial adalah misi khalifahan yang dilakukan sejak nabi adam as. Sebagaimana pakar. Sebagaimana dikemukakan H.M Quraish Shihab dalam bukunya wawasan al-quran, menyatakan bahawa kesejahteraan sosial yang didalamnya al-quran tercermin di surga yang dihuni oleh adam dan istrinya sesaat sebelum mereka turun melaksanakan tugas di bumi sebagai kekhalifahan.²⁵

Kesejahteraan sosial dalam islam adalah pilar terpenting dalam keyakinan seorang muslim adalah kepercayaan bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT. Ia tidak tunduk kepada siapapun kecuali kepada Allah SWT. Allah berfirman dalam Surat Luqman ayat 32 yang berbunyi:

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 1994), hal 508

²⁵ Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembngunan...*, hal. 85-8

وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوَاجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الدَّرِّ قَامُوا مُتَّصِدِينَ وَمَا يَجِدُ بَيْنَنَا إِلَّا كُلُّ بَثْرٍ مَعَاذَ اللَّهِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

Ayat ini merupakan dasar bagi piagam kebebasan sosial islam dari segala bentuk perbudakan. Menyangkut dalam hal ini, al-quran dengan tegas menyatakan bahwa tujuan utamanya dari misi kenabian Muhammad SAW merupakan melepaskan manusia dari beban dan rantai yang membelenggunya. Islam memandang kebebasan individu sebagai bagian kesejahteraan yang tinggi dalam masalah kesejahteraan yang berkaitan dengan masyarakat.²⁶

4. Indikator kesejahteraan

Kesejahteraan dapat diukur dengan berbagai indikator-indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran ketercapaian masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Kesejahteraan hanya dapat diukur dengan indikator moneter menunjukkan aspek ketidak sempurnaan ukuran kesejahteraan karena adanya kelemahan indikator moneter. Konsep kesejahteraan dapat dirumuskan sebagai makna dari konsep martabat manusia antara lain:

- a. Rasa aman (*security*)
- b. Kesejahteraan (*welfare*)
- c. Kebebasan (*freedom*)
- d. Jati diri (*identity*)

²⁶ *Ibid*, hal 89

Kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek antara lain:

- a. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi. Seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya.
- b. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik. Seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam.
- c. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental. Seperti fasilitas Pendidikan, lingkungan budaya.
- d. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual. Seperti moral, etika, keserasian penyesuaian.²⁷

5. Konsep kesejahteraan ekonomi menurut pandangan islam

Ekonomi islam merupakan salah satu bagian dari syariat islam, tujuan tentu tidak lepas dari tujuan utama syariat islam. Tujuan utama ekonomi islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-tayyibah*).

Secara terperinci kesejahteraan ekonomi islam dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kesejahteraan ekonomi merupakan tujuan ekonomi yang sangat terpenting. Kesejahteraan ini mencakup kesejahteraan individu, masyarakat dan negara.

²⁷ Bintarto, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 1989), hal

- b. Tercukupinya kebutuhan dasar manusia, meliputi makanan, minuman, pakaian tempat tinggal, kesehatan, Pendidikan, keamanan serta sistem negarayang menjamin terlaksananya kecukupan kebutuhan dasar secara adil dalam bidang ekonomi.
- c. Penggunaan sumber data secara optimal, efisien, efektif, hemat dan tidak mubazir.
- d. Distribusi harta, kekayaan, pendapatan dan hasil pembangunan secara adil dan merata.
- e. Menjamin kebebasan individu.
- f. Kesamaan hak dan peluang.
- g. Kerjasama dan keadilan.

Chapra ingin menegaskan (dengan membuat pemaparan cukup komprehensif terutama atas dasar dan dengan landasan filosofis dan teoritis), bahwa umat islam tidak perlu berpaling ke Timur atau ke Barat dalam mewujudkan kesejahteraan, khususnya dalam bidang ekonomi tetapi berpaling pada islam. Dia mengamati bahwa banyak negara-negara islam atau yang berpendudukan mayoritas islam telah mengambil pendekatan pembangunan ekonomi dari Barat dan Timur, dengan menerapkan sistem kapitalis, sosialis atau negara kesejahteraan.²⁸

²⁸ Umer Chapra, *Islam dan Tantanga Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000) hal 304

Sementara itu konsep negara sejahtera, yang mencoba menggabungkan mekanisme harga dengan jumlah perangkat lainnya. Terutama dalam pembiayaan kesejahteraan oleh negara untuk menjamin keadilan. Penambahan atau pengeluaran untuk sektor publik tidak dibarengi dengan suatu pengurangan ganti rugi dalam klaim-klaim lain atas sumber-sumber dengan devisa anggaran yang membengkak meskipun telah ditetapkan beban pajak yang berat. Keadaan itu dapat menimbulkan pemakaian sumber-sumber daya semakin buruk, meningkatkan ketidakseimbangan internal dan eksternal. Masalah kemiskinan dalam kebutuhan-kebutuhan tetap tak terpenuhi. Ketidakadilan justru semakin bertambah. Problem yang dihadapi negara sejahtera yaitu bagaimana menghapus ketidakseimbangan yang diciptakannya. Sistem ini tidak memiliki mekanisme filter yang disepakati selain harga untuk mengatur permintaan secara agregat, dunia hanya bersandar sepenuhnya kepada mekanisme pasar dalam menghapus ketidakseimbangan yang ada.²⁹

C. Simpan Pinjam Kelompok Perempuan

Kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan merupakan kegiatan memberikan modal untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan aktivitas pengelolaan dana simpanan pengelolaan dana pinjaman.

1. Tujuan SPP

²⁹ *Ibid*, hal 373-374

a. Tujuan umum

Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan dalam pendanaan sosial dasar, dan memperkuat lembaga kegiatan kaum perempuan dan penanggulangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja.³⁰

b. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dalam kegiatan ini adalah:

- 1) Mempercepat proses pemenuhan pendanaan dalam kebutuhan usaha.
- 2) Memberikan kesempatan pada kaum perempuan untuk meningkatkan perekonomian rumah tangga melalui dana usaha.
- 3) Mendorong kekuatan kelembagaan dalam simpan pinjam kelompok perempuan.

2. Ketentuan Dasar SPP

Ketentuan dasar SPP adalah kemudahan, keberdayaan, keterlembagaan, pengembangan, akuntabilitas. Kemudahan merupakan masyarakat miskin yang mudah dan cepat mendapatkan pelayanan pendanaan kebutuhan tanpa syarat agunan. Keterlembagaan artinya dana SPP disalurkan melalui kelompok yang sudah memiliki tata cara dan

³⁰ M.Iqbal Tuasikal, *Integrasi PNPM Mandiri dalam Pembangunan Desa*, (Langkat: Fasilitator Kabupaten: PNPM-MP, 2012), hal 12

prosedur yang baku dalam pengelolaan simpanan dan pengelolaan pinjaman. Keperdayaan merupakan proses pengelolaan didasari oleh keputusan yang professional oleh kaum perempuan dengan mempertimbangkan pelestarian lingkungan dalam kesejahteraan. Pengembangan artinya keputusan pendanaan harus berorientasi pada peningkatan pendapatan sehingga meningkatkan pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat. Akuntabilitas artinya dalam melakukan pengguliran harus dapat di pertanggung jawabkan kepada masyarakat.

3. Ketentuan pendanaan BLM

Dana bantuan langsung masyarakat (BLM) adalah dana yang disediakan untuk mendanai kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan (SPP) perkecamatan maksimal 25% dari alokasi BLM.

1) Sasaran dan bentuk kegiatan

- a. Sasaran program adalah rumah tangga miskin yang produktif yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuh sosial dasar melalui kelompok simpan pinjam perempuan yang sudah ada di masyarakat.
- b. Bentuk kegiatan SPP adalah memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal kerja bagi kelompok kaum perempuan yang mempunyai pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman.

2) Ketentuan kelompok SPP, yaitu:

- a. Kelompok yang dikelola dan anggotanya perempuan yang satu sama lain saling mengenal, memiliki kegiatan tertentu dan pertemuan rutin yang sudah berjalan sekurang-kurangnya satu tahun.
- b. Mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan dana simpanan dan dana pinjaman yang telah disepakati.
- c. Telah mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai sumber dan pinjaman yang diberikan kepada anggota.
- d. Mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana.

Dengan adanya kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan tersebut bisa membantu para perempuan-perempuan rumah tangga dibidang usaha untuk membantu perekonomian keluarga, apalagi jika usaha tersebut menjadi mata pencaharian utama. Dengan demikian, simpan pinjam berkaitan dengan pemberdayaan bagi kaum perempuan, dan pemberdayaan berkaitan dengan upaya perubahan dalam struktur sosial masyarakat, karena terjadinya *sharing power*, penetapan keputusan dalam berkewenangan. Pemberdayaan pada kegiatan simpan pinjam memiliki tujuan dua arah antara lain: melepas kehidupan kemiskinan, keterbelakangan dan memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur kekuasaan.³¹

³¹ *Ibid*, hal 29

4. Mekanisme Pengelolaan Simpan Pinjam

Mekanisme pengelolaan merupakan mengacu pada alur kegiatan program, dengan beberapa penjelasan dan tahapan antara lain:

a. Musyawarah Antar Desa

Dalam musyawarah antar desa (MAD), dilakukan sosialisasi ketentuan dan persyaratan untuk kegiatan SPP sehingga pelaku tingkat desa berkumpul di kecamatan memahami adanya kegiatan SPP dan bermanfaat.

b. Musdes Sosialisasi

Dalam musdes sosialisasi dilakukan sosialisasi dengan ketentuan dan persyaratan untuk kegiatan SPP di tingkat desa sehingga pelaku-pelaku tingkat desa memahami adanya kegiatan SPP dan melakukan persiapan proses lanjut.

c. Musyawarah Dusun

Proses identifikasi kelompok melalui musyawarah di dusun/kampung. Hasil dari musyawarah dusun dituangkan dalam berita acara dilampiri:

- a) Daftar kelompok yang diidentifikasi
- b) Kelompok SPP dengan daftar pemanfaat yang diusulkan
- c) Peta sosial dan peta rumah tangga miiskin
- d) Rekap kebutuhan manfaat

d. Musyawarah desa dan MKP

Musyawarah ini merupakan tahapan seleksi di tingkat desa.

e. Verifikasi

Verifikasi kelompok SPP mencakup beberapa hal sebagai berikut:

- a) Pengalaman kegiatan simpan pinjam
- b) Persyaratan kelompok
- c) Kondisi kegiatan simpan pinjam dengan penilaian:
 - 1) Permodalan
 - 2) Kualitas pinjaman
 - 3) Administrasi dan pengelolaan
 - 4) Pendapatan
 - 5) Likuiditas (pendanaan jangka pendek)

f. MAD Prioritas Usulan

Tahap ini merupakan tahapan usulan evaluasi terakhir dengan model prioritas kebutuhan dengan pertimbangan hasil verifikasi. Prioritas penilaian ditekankan pada kelompok yang lebih mengutamakan calon pemanfaat kategori rumah tangga miskin. Untuk kelompok yang layak dan akan ditandai BLM, tahap selanjutnya adalah melakukan penyempurnaan dokumen usulan misalnya: KTP dan Perjanjian Pinjaman.

g. Penetapan Persyaratan

Penetapan persyaratan pinjaman yang tertuang dalam perjanjian pinjaman paling tidak mencakup hal-hal:

- a) Penentuan jasa pinjaman dengan ketentuan, besar jasa pinjaman ditentukan berdasarkan bunga pasar untuk pinjaman pada lembaga

keuangan pada wilayah masing-masing. Sistem perhitungan jasa pinjaman menurun atau tetap.

- b) Jangka waktu pinjaman sumber dana BLM maksimal 12 bulan.
- c) Jadwal angsuran dana BLM paling tidak diangsur 3 kali angsuran dalam 12 bulan dengan memperhatikan dengan siklus usaha baik pada tingkat pemanfaat maupun tingkat kelompok.
- d) Angsuran langsung dari kelompok ke UPK.

h. Pencairan Dana

Ketentuan pencairan dana BLM dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Pencairan mulai desa sesuai dengan ketentuan program dilampiri SPPB dengan bukti penyaluran dana KW2.
 - b) Pencairan dilakukan sekaligus (100%) pada setiap kelompok.
 - c) Dalam saat bersamaan ketua TPK memberikan dana SPP dikurangi operasional UPK 2% dan operasional desa 3% dengan dibuktikan kuitansi yang ditanda tangani oleh ketua UPK sebagai pengelola kegiatan.
 - d) Kelompok membuat perjanjian pinjaman dengan UPK sebagai lampiran kuitansi penerimaan dana.
 - e) Kelompok menyerahkan kuitansi/ tanda terima uang permanfaat kepada UPK.
- i. Pengelolaan dokumen dan administrasi di UPK Pengelolaan Kegiatan di tingkat UPK meliputi:

- a) Pengelolaan dokumen UPK mencakup beberapa hal antara lain: pengelolaan data kelompok dan pinjaman atau manfaat, pengelolaan proposal penulisan usulan dengan peta sosial, pengelolaan dokumen penyalur: kuintansi, SPPB.
- b) Pengelolaan administrasi meliputi: rekening pengembalian SPP, buku bantuan bank SPP, buku kas harian SPP, kartu pinjaman.
- c) Pengelolaan laporan sebagai berikut: laporan realisasi penyaluran, laporan pengembangan pinjaman SPP, laporan kolektibilitas SPP, neraca, laporan operasional.
- j. Pengelolaan dokumen dan administrasi di kelompok. Hal-hal yang dikelola kelompok meliputi: data-data pinjaman, dokumen pendanaan/kuitansi di kelompok maupun pemanfaat, administrasi realisasi pengembalian pinjaman ke UPK, administrasi penyaluran dan pengembalian/kartu pinjaman dan administrasi pinjaman manfaat.
- k. Penetapan daftar tunggu
Usulan kegiatan kelompok SPP yang belum di terdani oleh BLM tetapi telah dianggap layak dapat didanai dengan dana bergulir. Jika dana bergulir tidak mencukupi maka kelompok layak ditetapkan sebagai kelompok tunggu yang dilaporkan dalam daftar tunggu kelompok
- l. Pelestarian dan pengembangan kegiatan
Pelestarian kegiatan SPP mengacu pada ketentuan pengelolaan dana bergulir dengan mempertimbangkan ketentuan akses BLM yang telah disepakati dalam acara MAD yang mencakup pelestarian kegiatan.

Pengembangan kegiatan SPP secara badan hukum dapat menjadi koperasi simpan pinjam. Fasilitas pengembangan kelompok dapat didasarkan pada tingkat pengembangan kelompok maupun fungsi kelompok.³²

5. Filosofi Simpan pinjam perempuan

Program Simpan Pinjam Perempuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (SPP PNPM Mandiri) merupakan wujud peniruan Grameen Bank ala Indonesia. SPP PNPM Mandiri penting dikaji karena program ini merupakan program pengentasan kemiskinan yang bersifat nasional sehingga diterapkan di seluruh Indonesia. Seperti Grameen Bank, Program SPP juga memberikan porsi istimewa bagi perempuan untuk mendapatkan akses pinjaman. Afirmatif ini penting diberikan karena secara umum biasanya gender dalam kredit masih dijumpai di Indonesia. Meskipun biasa gender masih ditemukan dalam pemberian kredit pada bank konvensional, namun pemerintah mulai menganggap penting partisipasi perempuan dalam program-program pemberdayaan masyarakat. Selain SPP terdapat beberapa program pemberdayaan masyarakat di Indonesia yang mengistimewakan perempuan, misalnya dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Meskipun laki-laki merupakan kepala keluarga, namun dalam PKH hanya perempuanlah yang berhak menerima uang bantuan dari pemerintah. Dalam

³² Mahila, *Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam Kelompok Perempuan pada unit pengelolaan kegiatan PNPM-MP Kecamatan Mendahara*, jurnal ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.13 No. 4 Tahun 2013, hal 51-52

Program SPP hanya perempuanlah yang boleh meminjam kredit dari negara.

Pemberian afirmatif kredit terhadap perempuan merupakan copy paste atau peniruan dari program-program sejenis di beberapa negara, terutama Bangladesh. Di Bangladesh laki-laki dianggap tidak amanah dalam menggunakan uang, selain itu laki-laki sering bertindak sewenang-wenang terhadap istrinya, dalam kondisi kekurangan ekonomi dan terjadi percekcoakan para suami dengan mudah memberikan talak kepada istrinya. Mudahnya proses perceraian dipengaruhi karena akses dan kontrol aset ekonomi keluarga berada di tangan laki-laki sehingga ketika terjadi perceraian, kepemilikan rumah dipegang pihak laki-laki. Dengan adanya program-program khusus perempuan, yang memberikan akses lebih pada perempuan, maka laki-laki tidak akan semena-mena lagi dan terbukti angka perceraian di Bangladesh turun setelah muncul program kredit khusus perempuan (Grameen Bank).

Selain alasan di atas, pengistimewaan perempuan dilakukan karena perempuan dianggap sebagai orang yang paling merasakan penderitaan ketika keluarga mengalami kemiskinan karena ia orang yang bertugas di dapur (domestik). Ketika anak-anak kelaparan mereka akan datang mengeluh ke ibu, bukan ke bapak, oleh karena itu perempuan mempunyai tekad yang lebih kuat dalam pengentasan kemiskinan sehingga ia perlu mendapat posisi istimewa dalam program-program pemberdayaan masyarakat. Grameen Bank juga mencatat pengalaman bahwa peminjam

perempuan mendatangkan manfaat jauh lebih banyak dari para peminjam laki-laki bagi perbaikan kondisi keluarga. Meski pun dilihat dari kontrol ekonomi keluarga, kondisi Bangladesh dan Indonesia relatif sama, namun apakah peniruan tersebut menghasilkan dampak yang sama jika program-program di Bangladesh tersebut begitu saja diadopsi di Indonesia. Munculnya kebijakan afirmatif yang mengistimewakan perempuan melahirkan pembalikan gender (gender refusal), dimana laki-laki tidak diberi porsi dalam program pemberdayaan masyarakat. Padahal dalam budaya Jawa, laki-laki diperankan untuk berada di depan ketika berurusan dengan persoalan publik dan perempuan melakukan tugas-tugas domestik. Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program yang khusus ditujukan untuk perempuan sehingga muncul pertanyaan; Bagaimana ketika tradisi budaya berbenturan dengan program-program pemberdayaan yang mewajibkan atau memberikan afirmatif bahwa perempuan berada di depan? Apakah tradisi yang mengalah atukah program yang harus disiasati? Bagaimana peran laki-laki dalam program pemberdayaan perempuan? Apakah laki-laki benar-benar tidak terlibat dalam program atau laki-laki hanya terlibat kalau diminta oleh perempuan atau meskipun label program adalah pemberdayaan perempuan, namun di dalamnya laki-laki tetap mendominasi peran dan mengontrol aset pemberdayaan.³³

³³ Jaya, *Peran Laki-Laki Dalam Program Pemberdayaan Perempuan*, jurnal studi gender dan islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Vol. 17 No. 1 Tahun 2018, hal 71

D. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang mempunyai judul atau objek penelitian yang hampir sama, diantaranya adalah:

Penelitian yang dilakukan oleh Septiani “*Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Terhadap Peningkatan Ekonomi Rumah Tangga Di Dusun Satu Kecubung Desa Terbanggi Lampung Tengah*”.³⁴ Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan berbasis lokal terhadap peningkatan ekonomi rumah tangga melalui pelatihan penggemukan sapi melainkan aktifitas sehari-hari seperti bekerja diperusahaan dan mengikuti PIR, dalam hal ini peningkatan rumah tangga ekonomi mengalami perubahan. Dengan adanya ini hubungan antara perusahaan dengan masyarakat lebih menguntungkan karena pada saat menjual sapi tidak perlu untuk mendaftarkan sapi kepada perusahaan. Yang membuat penelitian tersebut sama dengan peneliti adalah dengan menggunakan metode kualitatif, Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan yang membedakan adalah penelitian tersebut dilakukan dengan meneliti pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Hal tersebut tidak menggambarkan tentang perilaku pemberdayaan masyarakat di BUMdesMA Udanawu Blitar.

Penelitian yang dilakukan oleh Indiarti, “*analisis pemberdayaan ekonomi perempuan melalui program simpan pinjam khusus perempuan*

³⁴ Septiani, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Terhadap Peningkatan Ekonomi Rumah Tangga Di Dusun Satu Kecubung Desa Terbanggi Lampung Tengah*, skripsi, (Lampung, UIN RADEN INTANG 2017)

(SPP) di KSPSS Cahya Pundi Sakinah Desa Leran Kulon Kecamatan Palang Kabupaten Tuban dalam perspektif ekonomi Islam {studi anggota Aisyiyah ranting Leran Kulon}.”³⁵ Hasil penelitian tersebut adalah kegiatan program SPP berperan aktif dalam perekonomian di anggota Aisyiyah serta meningkatkan SDM bagi pelaku peminjam modal, serta kendala yang dihadapi ialah kurangnya pendampingan dalam pengelolaan SDM, penyalahgunaan dalam peminjaman modal. Yang membuat penelitian itu sama dengan peneliti yaitu terdapat pada kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan. Sedangkan yang membedakan peneliti berfokus pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan SPP di Udanawu Blitar.

Penelitian yang dilakukan oleh Hanafi, “*pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sentra industri batu ornament di ngeposari, semanu, gunung kidul.*”³⁶ Penelitian ini bermaksud ingin mengetahui upaya pengembangan ekonomi masyarakat melalui sentra industri batu orname, dalam pemberdayaan terdapat beberapa aspek pemberdayaan yaitu: *pertama* adalah membuka akses sumber daya setempat dengan mengembangkan potensi sumber daya alam. *Kedua* memecahkan permasalahan seputar produksi dan pemasaran sehingga mencari solusi dari permasalahan tersebut. *Ketiga* adalah membangun kerjasama. Yang

³⁵ Indiarti “*Analisis Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Program Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) Di KSPSS Cahya Pundi Sakinah Desa Leran Kulon Kecamatan Palang Kabupaten Tuban Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Anggota Aisyiyah Ranting Leran Kulon)*. (Surabaya, UINSA 2019)

³⁶ Hanafi, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Sentra Industri Batu Ornament Di Ngeposari, Semanu, Gunungkidul*. (Yogyakarta, UINSUKA 2016)

membuat penelitian itu sama terdapat pada metode yang digunakan yaitu metode kualitatif, teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedang yang membedakan adalah perbedaan focus penelitian, lokasi penelitian dan tujuan penelitian untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian dalam kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan di Udanawu Blitar.

Penelitian yang dilakukan Arfianto, dengan judul “*Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Desa*”³⁷. Hasil dari penelitian tersebut adalah peran pemerintah dan non pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Peran pemerintah dinas pertanian dan perternakan: 1) sosialisasi mengenai pembinaan, 2) pemberian bantuan berupa ternak, 3) pengawasan kepada kelompok ternak. Peran non pemerintah sebagai administrasi perekonomian & sumber daya alam antara lain: 1) fungsi koordinasi terhadap SKPD terkait dalam melakukan seleksi, 2) fasilitas terkait branding kampung/lokasi. Pada penelitian ini letak perbedaan pada fokus penelitian, lokasi penelitian. Untuk persamaan terdapat pada pemberdayaan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan Syamsudin, dengan judul “*Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Di Desa Polewali Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara*”.³⁸ Hasil dari

³⁷ Arfianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi Desa*, Jurnal JKMP, Vol. 2, No 1 (2014)

³⁸ Syamsudin, *Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Di Desa Polewali Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara*, Jurnal Katalogis, Vol. 4, No 2 (2016)

penelitian tersebut adalah seluruh komponen tata kelola pada penyebaran informasi dalam partisipasi pemetaan rumah tangga miskin (RTM), perencanaan pada tingkat perkembangan berkelanjutan pada para pengelola (UPK). Pengelolaan dan pelaksanaan program lebih mengedepankan kegiatan dengan mengabaikan kelengkapan administrasi dan pelaporan keuangan dan laporan pelaksanaan kegiatan dengan baik. Yang membuat penelitian tersebut sama dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah pada obyek yang diteliti, yaitu pemberdayaan masyarakat. Sedangkan yang membedakan adalah penelitian tersebut dilakukan dengan meneliti program nasional pemberdayaan mandiri di mamuju utara.

Penelitian yang dilakukan Elyati, "*Upaya PNPM Mandiri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kebuyutan Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang*".³⁹ Hasil penelitian adalah pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri di Desa kebuyutan diputuskan oleh desa dalam pelaksanaan simpan pinjam kelompok perempuan, dan dilaksanakan kegiatan pemberian modal saat peguliran belangsung untuk kelompok perempuan yang bertujuan untuk mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pedanaan atau kegiatan sosial. Peran PNPM Mandiri ialah untuk mensejahterakan masyarakat di Desa Kebuyutan dalam kegiatan perguliran dana untuk kegiatan kelompok perempuan yang membutuhkan modal. Namun dalam PNPM Mandiri dalam mensejahterakan masyarakatnya

³⁹ Elyati, *upaya PNPM Mandiri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kebuyutan Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang* (Jakarta: UIN Sayrif Hidayatullah, 2012)

hanya bisa membantu dalam hal permodalan, karena dana yang di kucurkan sangat sedikit sedangkan dana yang dibutuhkan masyarakat sangat banyak. Yang membuat penelitian tersebut sama dengan penelitian yang diteliti peneliti lakukan adalah pada obyek pemberdayaan dan mensejahterakan masyarakat. Sedangkan yang membedakan adalah penelitian tersebut dilakukan dengan meneliti di PNPM Mandiri di Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang.

Penelitian yang dilakukan Lutfiyah, *pengembangan desa mandiri melalui BUMdes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa (Studi kasus: Desa Tamboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan)*.⁴⁰

Hasil penelitian ini adalah diperlukan upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk mendorong badan usaha milik desa agar mampu mengelola aset ekonomi strategis di pedesaan sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi pedesaan melalui: 1) Pelatihan pengelolaan badan usaha milik desa, baik upaya peningkatan kapasitas kelembagaan badan usaha milik desa, peningkatan kapasitas sumber daya manusia maupun pengembangan pemberdayaan usaha badan usaha milik desa itu sendiri, 2) Program pendampingan badan usaha milik desa dari dinas / instansi terkait yaitu melakukan kemitraan dengan Perguruan Tinggi, 3) Sosialisasi badan usaha milik desa ke masyarakat desa dilakukan dengan berkelanjutan. Modal sosial merupakan

⁴⁰ Lutfiyah, *Pengembangan Desa Mandiri Melalui BUMdes dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus : Desa Tamboro kecamatan Karas Kabupaten Magetan)*, Jurnal AKSI Vol 1 No 1, (2018)

kemampuan masyarakat desa untuk saling berhubungan dan bekerjasama yang saling menguntungkan meliputi kepercayaan, jaringan dan norma yang mengaturnya yang dapat mendorong pada sebuah kolaborasi sosial untuk kepentingan bersama. Yang membuat penelitian sama dengan peneliti adalah pada obyek meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan yang membedakan dengan peneliti terdapat pada focus penelitian, lokasi penelitian.

Penelitian yang dilakukan Hurint, "*evaluasi program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan di kecamatan lewolema (studi kasus kegiatan simpan pinjam untuk perempuan di Desa Sinar Hading dan Desa Balukhering)*"⁴¹. Hasil penelitian adalah pembangunan desa tertinggal merupakan upaya terencana mengubah wilayah-wilayah yang dihuni komunitas dengan berbagai permasalahan sosial, ekonomi, serta keterbatasan sarana dan prasarana. Berdasarkan kondisi tersebut, maka diperlukan program pembangunan yang lebih difokuskan pada upaya percepatan pembangunan di daerah-daerah yang kondisi sosial, ekonomi, keuangan daerah, aksesibilitas dan ketersediaan infrastruktur masih tertinggal. Salah satunya yaitu program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri yang mulai dilaksanakan sejak tahun 2007 dan telah menjangkau desa-desa tertinggal diseluruh Indonesia. Dalam pelaksanaan PNPM-MP khususnya kegiatan Simpan pinjam untuk perempuan (SPP),

⁴¹ Hurint, *Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Di Kecamatan Lewolema (Studi Kasus Kegiatan Simpan Pinjam Untuk Perempuan Di Desa Sinar Hading Dan Desa Balukhering)*, Jurnal administrasi public dan birokrasi vol. 1 no. 1, (2014)

pelaku program tingkat kecamatan hanya berorientasi pada pemanfaatan dana bergulir dalam arti memberikan pinjaman dan menerima cicilan dari kelompok kaum perempuan, kurang memperhatikan dampak program terhadap usaha kelompok perempuan dan penguatan kelembagaan kelompok perempuan. Hal ini menunjukkan: 1) percepatan proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar merupakan salah satu tujuan yang ingin dipenuhi dalam kegiatan SPP, 2) memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha, 3) mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan. Yang membuat penelitian sama dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah metode yang digunakan yaitu metode kualitatif, teknik wawancara, observasi, dokumentasi. Sedangkan yang membedakan adalah penelitian tersebut dilakukan dengan meneliti kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan di Desa Sinar Hading dan Desa Balukhering.

Penulis dalam skripsi ini, peneliti memaparkan tentang pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian dalam kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan dan dalam penelitian terdahulu yang sudah ditulis di atas, sama-sama mengangkat tema pemberdayaan masyarakat pada kesejahteraan, akan tetapi tetap memiliki beberapa perbedaan seperti fokus penelitian, judul, dan tempat penelitian. Posisi peneliti pada penelitian ini memiliki pendapat dan teori baru, jadi tidak menguatkan penelitian terdahulu yang ada.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah serangkaian konsep dan kejelasan hubungan antara konsep tersebut yang dirumuskan oleh peneliti berdasarkan tinjau pustaka, dengan meninjau teori yang disusun, digunakan sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diangkat agar peneliti mudah dalam melakukan penelitian. Kerangka berpikir pada dasarnya mengungkapkan alur pikir atau peristiwa (fenomena) sosial yang diteliti secara logis dan rasional, sehingga jelas proses terjadinya fenomena sosial yang diteliti dalam menjawab atau menggambarkan masalah penelitian.⁴²

⁴² Hamidi, *metode penelitian kualitatif*, (Malang: UMM Press, 2005), hal 19

GAMBAR 2.1

Kerangka Konseptual

